

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Penelitian ini menggambarkan bahwa pengembangan kapasitas dalam pengelolaan hutan nagari oleh Dinas Kehutanan di Nagari Salibutan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman sudah cukup baik. hal ini dapat dilihat dari tiga tingkatan dalam pengembangan kapasitas, yang mana pada tingkat individu, pengetahuan, keterampilan, dan etika kerja pengurus LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung sudah cukup baik. Namun masih perlu upaya untuk meningkatkan dalam hal kompetensi dengan menerapkan sistem *reward* dan penyampaian kemajuan kepada LPHN lain untuk memotivasi pengurus LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung dan dampak positif pula bagi LPHN lain di Sumatera barat.

Pada tingkat organisasi, sumber daya utama dalam organisasi belum lengkap, beberapa kebutuhan selayaknya perlu menjadi pertimbangan bagi Dinas Kehutanan agar pengelolaan hutan dapat tercapai sesuai harapan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Adapun kekurangan sumber daya utama yang dirasakan oleh LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung berupa sumber daya finansial. Kepastian finansial pengelola hutan nagari sudah sepantasnya menjadi pertimbangan Dinas Kehutanan untuk dianggarkan. Ketidak pastian sumber daya finansial sangat memungkinkan para penebang liar yang terserap oleh LPHN Nagari Salibutan dengan jumlah mencapai 150 orang akan kembali melakukan

penebangan liar, pandemi covid-19 memperburuk kemungkinan itu terjadi. Selain itu kekurangan juga dirasakan dalam pemenuhan sumber daya pendukung berupa operasional yang hingga saat ini masih menggunakan kendaraan pribadi yang bukan merupakan kendaraan khusus untuk menempuh jalur perhutanan. Sumber daya operasional ini sangat dibutuhkan terutama dalam melakukan patroli kehutanan sebagai salah satu tindakan pengamanan hutan dari aktifitas pengrusakan. Dalam hal manajemen informasi yang dibagi kedalam 2 bagian diantaranya: *Hardware* (Perangkat Keras) berupa komputer/*laptop* dan *wifi* masih menggunakan perangkat keras pribadi dan belum tersedia perangkat keras khusus untuk pengelolaan hutan nagari yang dapat diakses semua anggota. *Software* (Perangkat lunak) terutama dalam pengelolaan data base belum tersedia dan masih mengandalkan media sosial *facebook*, *Instagram*, dan sejenisnya saja sehingga masyarakat kesulitan untuk mengetahui informasi penting terkait LPHN.

Sedangkan pada tingkatan sistem upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah memberikan informasi dan sosialisasi tentang peraturan dan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat kepada LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung agar diikuti.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang disampaikan di atas, maka peneliti memberikan masukan kepada Dinas Kehutanan yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan nagari yang lebih baik, diantaranya:

1. Mempertimbangkan untuk menetapkan anggaran sebagai honorarium atau bantuan/insentif yang dapat memberdayakan pengurus LPHN agar para penebang liar

yang sudah diserap oleh LPHN Nagari Salibutan Lubuk Alung tidak kembali lagi kedalam hutan untuk melakukan penebangan liar.

2. Memperbaiki system manajemen informasi berupa penyediaan perangkat keras computer dan *wifi* agar dapat diakses seluruh anggota LPHN, sedangkan perangkat lunak Dinas Kehutanan perlu membina dalam pengelolaan data base LPHN dengan menyediakan *website* khusus sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait LPHN Salibutan Lubuk Alung.
3. Pengadaan kendaraan patroli minimal 1 unit untuk LPHN agar bisa melakukan pengelolaan hutan berupa patroli hutan secara maksimal.

